

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA KOTA RADEN HULU KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nirmawati¹, M. Husaini², Saidah Hasbiyah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: nirmawati154@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi kebijakan adalah fase pembuatan kebijakan yang terjadi antara pembuatan kebijakan dan dampak yang dihasilkan pada masyarakat yang terkena dampak. Dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ditemukan beberapa masalah seperti kurangnya sosialisasi, kendala transaksi, waktu pelaksanaan yang tidak sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pendekatan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mengidentifikasi sumber data melalui metodologi *purposive sampling*, dengan informan berjumlah 12 orang. Mereduksi, menyajikan, mengambil kesimpulan, dan memverifikasi data merupakan langkah-langkah dalam analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, kurang baik. Dapat dilihat dari indikator yang kurang baik yaitu kemampuan teknis, kemampuan menjalani hubungan, sosialisasi, komunikasi, dukungan masyarakat, kepatuhan masyarakat, tanggung jawab, dan wewenang. Adapun aspek yang sudah baik seperti, SOP. Dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat faktor pendukung yaitu adanya program SOP sudah menjalankan sesuai dalam melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Disisi lain terdapat faktor penghambat Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu gangguan jaringan, kurangnya informasi dari pihak program bantuan pangan non tunai (BPNT), kurangnya pemahaman masyarakat dalam ketentuan program bantuan pangan non tunai (BPNT), kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program bantuan pangan non tunai (BPNT).

Kata Kunci: Implementasi, Program dan Bantuan Pangan Non Tunai

ABSTRACT

Policy implementation is the phase of policy-making that occurs between the formulation of the policy and the impact it has on the affected community. In the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Kota Raden Hulu Village, Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency, several issues were found such as lack of socialization, transaction obstacles, and inappropriate timing of implementation. This research aims to understand the implementation and factors influencing the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Kota Raden Hulu Village, Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency. The research method used is qualitative, specifically employing a descriptive qualitative approach, with data collection methods including observation, interviews, and documentation. Identifying data sources through purposive sampling methodology, with a total of 12 informants. Reducing, presenting, extracting conclusions from, and verifying data are all steps in data analysis. The research results indicate that the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Kota Raden Hulu Village, Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency, is not good. It can be seen from the less favorable indicators, namely technical ability, relationship management ability, socialization, communication, community support, community compliance, responsibility, and authority. As for the aspects that are already good, such as SOP. In the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Kota Raden Hulu Village, Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency, there are supporting factors, namely the existence of SOP programs that have been implemented in accordance with the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT). On the other hand, there are inhibiting factors in the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Kota Raden Hulu Village, Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency, such as

network disruptions, lack of information from the non-cash food assistance program (BPNT), lack of public understanding of the non-cash food assistance program regulations (BPNT), and lack of public awareness of the non-cash food assistance program. (BPNT).

Keyword: *Implementation, Programs and Non-Cash Food Assistance*

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu keadaan yang ditandai dengan kekurangan yang signifikan yang menghalangi seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Persyaratan mendasar ini mencakup kebutuhan akan makanan, khususnya energi kalori, yang memungkinkan seseorang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan uang. Jenis kemiskinan yang paling menyedihkan adalah kemiskinan struktural, yang merupakan akibat dari sistem perekonomian saat ini. Ketidakadilan tidak ada kaitannya dengan keberadaan sejumlah besar individu miskin dan sekelompok individu kaya yang terbatas. Ketidakadilan terletak pada kecenderungan proses ekonomi yang menghasilkan kekayaan sosial yang lebih besar dan hanya menguntungkan kelompok kaya, mengabaikan kemajuan kelompok miskin (Rahardja and Manurung, 2020).

Pemerintah mengawali program pengentasan kemiskinan dengan menerbitkan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah diatur oleh Menteri Sosial Republik Indonesia dalam Peraturan Nomor 11 Tahun 2018 (Kementerian Sosial, 2018). Untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokoknya, pemerintah menyelenggarakan program BPNT.

Masyarakat dari segala usia dan kemampuan, termasuk generasi muda dari rumah tangga berpendapatan rendah, pekerja, anak-anak, lansia, dan petani di daerah pedesaan semuanya menghadapi tantangan kemiskinan di Indonesia. Kewajiban negara untuk menafkahi anak-anak miskin dan terlantar sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945 menunjukkan bahwa konsep negara dalam dokumen tersebut mengakui sistem atau proses perekonomian yang menyebabkan kemiskinan. Akibatnya, akan selalu ada sebagian masyarakat yang ditakdirkan hidup dalam kemiskinan, dan negara harus turun tangan untuk meringankan penderitaan mereka.

Pemerintah Indonesia meluncurkan pada tahun 2017, Program Bantuan Pangan Non Tunai berkontribusi dalam mempercepat proses pengentasan kemiskinan. Di dalam BPNT. Setelah berganti nama menjadi BPNT, Rastra dulu dikenal dengan nama Raskin yang merupakan singkatan dari Program Beras Masyarakat Miskin. Rastra adalah singkatan dari Subsidi Beras Sejahtera. Presiden Republik Indonesia memerintahkan pelaksanaan program ini dengan tujuan untuk mendorong inklusi keuangan dan menjadikan sasaran program lebih efektif dan akurat. Warga masyarakat berpendapatan rendah berhak menerima 15 kilogram beras setiap bulan melalui program Raskin, dengan biaya tebus sebesar 1.600 rupiah per kilogram. Mulai tanggal 28 Agustus 2015, program pemerintah yang dikenal dengan program dukungan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Rastra) diubah namanya dari skema subsidi beras masyarakat berpendapatan rendah (raskin). Program ini juga mengurangi bantuan pemerintah menjadi 10 kg beras per bulan dan menghilangkan biaya penebusan. gratis. Selain itu, pemerintah kembali menerapkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 25 November 2018 dan memberikan Rp. 110.000 dalam bentuk non tunai seperti beras dan telur, bukan uang tunai. Tujuan utama BPNT adalah memastikan masyarakat kurang mampu mempunyai akses terhadap pangan sebagai bentuk perlindungan sosial. Penerapan di seluruh negeri diharapkan dapat membantu masyarakat yang paling miskin, yaitu kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan. Eksekusi BPNT yang berkelanjutan, yang diproyeksikan akan berlanjut Tujuan Pembangunan Milenium akan dipercepat setidaknya hingga tahun 2019. Program pemerintah seperti Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) membantu daerah berpenghasilan rendah yang berisiko rawan pangan mendapatkan pangan yang dibutuhkan keluarganya.

Penerapan di seluruh negeri diharapkan dapat membantu masyarakat yang paling miskin, yaitu kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan. Eksekusi BPNT yang masih berjalan hingga setidaknya tahun 2019 akan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah inisiatif pemerintah yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin yang berisiko mengalami kerawanan pangan, sehingga memungkinkan mereka memperoleh pasokan pangan penting untuk rumah tangga mereka.

Sebelum program ini dilaksanakan secara nasional. Pemerintah disarankan untuk mengembangkan program alternatif yang memberdayakan masyarakat miskin, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada inisiatif bantuan pemerintah. Adapun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), terdapat desa di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga menjadi penerima BPNT tersebut, yakni di Desa Kota Raden Hulu tersebut dibagikan BPNT berupa beras yang harus diambil oleh keluarga penerima manfaat (KPM) ke kantor desa setempat.

Observasi awal menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi: kurangnya pemahaman penerima terhadap mekanisme program, hambatan transaksi, dan pemilihan waktu yang tidak tepat. pelaksanaan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan program dan variabel-variabel yang mempengaruhinya di Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Nasir (2022) Sekolah Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Sungai Anyar Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong”. Hasil penelitian dapat dilihat dari indikator. Pertama pada indikator lingkungan sosial belum baik yang mana masyarakat masih banyak yang berpendidikan rendah pada indikator lingkungan ekonomi masih belum baik yang mana tidak semua masyarakat miskin mendapatkan. Pada indikator politik masih sudah baik yang mana pihak-pihak yang terlibat memberikan respon yang baik. Kedua pada indikator kerjasama antar pelaksana dalam penerapan masih belum baik yang mana belum ada kerjasama. Pada indikator koordinasi antar indikator anggaran belum baik yang mana mendata tersebut hanya lewat pemantauan saja. Ketiga pada indikator anggaran belum baik yang mana dana di transfer ke rekening KPM. Pada indikator sumberdaya manusia kurang baik yang mana terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pelaksana. Keempat pada indikator struktur birokrasi sudah baik yang mana adanya dukungan dari pemerintah. Pada indikator SOP sudah baik yang mana struktur berjenjang. Dan Khasanah (2020) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin Di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Ketapang meningkatkan kemandirian masyarakat dalam melakukan transaksi non tunai dan menunjang perekonomian warga dengan memudahkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari sehingga meringankan beban keuangan mereka. Masyarakat yang sebelumnya menghadapi kesulitan kini menyaksikan peningkatan daya beli mereka. Hal ini meningkatkan efektivitas bantuan sosial melalui distribusi produk makanan non-moneter dan mendorong keuangan inklusif dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan kewirausahaan. Untuk memastikan pembayaran bantuan pemerintah tidak dicuri dari Keluarga Penerima Manfaat, maka diberlakukanlah Program Bantuan Pangan Non Tunai. Program ini melibatkan masyarakat dalam membangun keterampilan kewirausahaan melalui pembukaan *e-Warong* KUBE BPNT. Masyarakat dibatasi membeli bahan pokok seperti beras dan telur dengan dana Kartu Kesejahteraan Keluarga (KKS) Elektronik.

Yang dapat dikembangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti kali ini adalah lebih memfokuskan penelitian pada implementasi program bantuan pangan nontunai di Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan menggunakan teori Warwic dalam Reno Affrian (2023:48-50).

Pihak berwenang mengambil keputusan mengenai kebijakan publik ketika mereka berpikir bahwa hal tersebut akan memberikan manfaat bagi kebaikan bersama. Setiap kebijakan publik tentunya mempunyai proses perumusan dan peninjauan sebagaimana diuraikan di sini. Implementasi kebijakan adalah tempat terjadinya tindakan. Untuk menjamin kelancaran dan efisiensi pelaksanaan kebijakan, semua prosesnya saling bergantung dan harus saling mendukung dan tidak melemahkan satu sama lain. Tentu saja terdapat tata cara dalam pembuatan dan penilaian setiap kebijakan publik. Eksekusinya terjadi pada tingkat implementasi kebijakan. Semua proses kebijakan saling bergantung; mereka tidak dapat meremehkan satu sama lain tetapi harus memperkuat satu sama lain untuk memastikan fungsionalitas yang optimal. Keputusan dan pilihan mengenai pengelolaan dan distribusi sumber daya moneter, alam, dan manusia untuk kepentingan masyarakat umum secara kolektif dikenal sebagai kebijakan publik (Hayat, 2018). Prinsip-prinsip yang muncul dalam suatu masyarakat, baik dipraktekkan atau tidak, dapat diakomodasi oleh tindakan yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan publik, yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran masyarakat. Sederhananya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diambil atau tidak dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan mencapai kebaikan masyarakat. Kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai undang-undang yang ditujukan untuk maksud dan tujuan program dan tindakan pemerintah. Eksekusi pilihan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang tetapi juga dalam bentuk perintah, perintah eksekutif, atau keputusan otoritas peradilan, dikenal sebagai implementasi. Fokus implementasi kebijakan menurut implementasi ini adalah mengetahui apa yang terjadi setelah suatu program dinyatakan efektif atau dirumuskan. Hal ini mencakup segala sesuatu mulai dari upaya untuk menjalankan pedoman kebijakan publik hingga dampak atau dampak nyata yang ditimbulkannya terhadap masyarakat atau peristiwa masa lalu (Wahab, 2017). Proses pelaksanaan suatu kebijakan didahului dengan penelitiannya, yang disebut implementasi. Keputusan-keputusan para pengambil kebijakan akan dianggap tidak terpenuhi kecuali jika keputusan-keputusan tersebut diimplementasikan secara efektif (Affrian, 2023). Bagian integral dari setiap kerangka kebijakan adalah tahap implementasi, karena pada saat inilah proses pembuatan kebijakan secara keseluruhan rentan terhadap perubahan. Ada banyak aspek yang saling terkait yang akan menentukan seberapa sukses pelaksanaan program. Pemerintah memfasilitasi perolehan bahan pangan dari pedagang pangan/e-warong yang bermitra dengan perbankan dengan memberikan bantuan pangan nontunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya dengan menggunakan sistem rekening elektronik.

METODE

Secara khusus, penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-kualitatif, yaitu cara untuk menggali dan memahami bagaimana masyarakat dan komunitas memandang dan memahami permasalahan sosial dan kemanusiaan. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi (Sidiq dan Choiri, 2019). Dengan menggunakan *purposive sampling*, peneliti memilih 12 informan untuk dijadikan sebagai sumber data peneliti. Dengan menggunakan teori Implementasi menurut Warwic dalam (Affrian, 2023), yakni Kemampuan organisasi, Informasi, Dukungan dan Pembagian potensi. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif melibatkan proses berkelanjutan seperti reduksi data, penyajian data, penyusunan kesimpulan, dan verifikasi hingga

tercapai kejenuhan (Sugiyono, 2017). Uji Kredibilitas penelitian diperiksa dengan menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, mengadakan *member check* (Sugiyono, 2017).

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Warwic dalam (Affrian, 2023) menyatakan bahwa untuk mengukur Implementasi suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Kemampuan Organisasi

Pada tahap proses pembuatan kebijakan ini, “implementasi” berarti mampu melaksanakan tugas-tugas yang diharapkan dari suatu perusahaan atau kelompok.

a. Kemampuan Teknis

Kemampuan teknis merupakan kemampuan yang tersalurkan, singritas penerapan atau pelaksanaan seperti jenjang koordinasi dari kementerian sosial, dinas sosial, kemudian berkerjasama dengan bank mandiri lalu dilaksanakan oleh *e-warong*.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti pada indikator kemampuan teknis dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat disimpulkan bahwa kurang baik. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme program oleh petugas, seperti ATM sering gangguan dan minimnya pelatihan dalam pelaksana, selain itu lemahnya koordinasi antara dinas sosial, dan pihak penyalur, seperti bank atau *e-warong*. Akibatnya proses penyaluran bantuan menjadi lambat dan sulit terealisasi secara optimal.

b. Kemampuan Menjalani Hubungan

Kemampuan menajalani hubungan sebuah relasi antara individu satu dengan yang lain seperti menajalani hubungan sinergitas antara bank mandiri setiap bulannya melakukan rekonsiliasi data yang mana rapat koordinasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti pada indikator kemampuan menjalani hubungan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang baik. Hal ini dikarenakan hubungan dari Dinas Sosial dan tim pelaksanaan masih kurang dengan masyarakat, tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat membuat masyarakat masih kurang mengetahui program ini, serta mekanisme dan distribusi rumit terutama yang tidak mengerti teknologi, apa lagi mesinnya sering bermasalah dan kualitas beras yang kurang atau yang diterima lebih sedikit, bantuan ini kebanyakan lama dapatnya padahal sudah waktunya sekali dicek saldo tidak ada.

c. Standard Operating Procedure (SOP)

SOP adalah rangkaian prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan sebagai panduan untuk mencapai tujuan. SOP berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pedoman.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada indikator SOP dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah baik. Hal ini terlihat dari

pelaksanaan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023. Bantuan dari tingkat kecamatan disalurkan ke desa, dan desa bertugas menyalurkannya langsung kepada penerima. Program ini diatur tim pelaksana mulai dari strukturnya, kepala desa, pendamping, koordinator, dan *e-warong* sudah baik pelaksanaannya.

2. Informasi

Kemampuan organisasi pelaksana objek kebijakan untuk berkomunikasi satu sama lain atau informasi yang dikirim oleh aktor ke objek kebijakan.

a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses dimana individu mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat terhadap individu supaya individu bagian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada indikator sosialisasi dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai kurang baik. Hal dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada penerima bantuan, membuat penerima masih belum mengetahui program ini dan kebanyakan penerima bantuan adalah orang tua atau lansia yang dimana masih belum memahami program ini sepenuhnya. Bahkan, mereka sering merasa kebingungan, terutama dalam menggunakan kartu bantuan yang diberikan.

b. Komunikasi

Apa yang kita sebut “komunikasi” sebenarnya mengacu pada tindakan menyampaikan ide dan informasi dari satu individu ke individu lain melalui berbagai bentuk media.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada indikator komunikasi dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang baik. Hal ini dikarenakan komunikasi dari pemerintah desa ke penerima masih kurang baik, penerima bantuan tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang cara menggunakan kartu elektronik maupun jadwal pencairan bantuan. Sebagian menerima mengetahui informasi yang lebih awal, tetapi banyak yang tidak mendapatkan informasi sama sekali. Selain itu, sejak awal pelaksanaan program, sosialisasi terkait teknis penggunaan kartu, tujuan, dan manfaat bantuan ini tidak dilakukan secara optimal. Akibatnya, sebagian besar penerima tidak memahami mekanisme program, sehingga bantuan tidak dimanfaatkan secara maksimal.

3. Dukungan

Kurangnya dukungan dari objek-objek kebijakan untuk terkait pada suatu kegiatan atau untuk memenuhi suatu kewajiban tertentu. Tingkat kepatuhan mereka menurun jika isi kebijakan itu berseberangan dengan opini atau keputusan mereka.

a. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat terhadap pemerinatah dalam upaya mewujudkan masyarakat sejahtera yaitu partisipasi aktif program ini..

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada indikator dukungan masyarakat dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang baik. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap prosedur program, adanya persyaratan

administrasi yang dianggap memberatkan, serta minimnya peran aktif dari aparat desa dalam membantu masyarakat mengatasi kendala tersebut. Akibatnya sebagian masyarakat merasa enggan atau kesulitan untuk mengakses bantuan, meskipun program ini bertujuan untuk meringankan beban mereka.

b. Kepatuhan Masyarakat

Kepatuhan masyarakat merupakan kepatuhan seseorang terhadap prosedur atau peraturan dapat diukur dengan tingkah laku yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti pada indikator kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang baik. Hal ini dikarenakan seperti menjual atau menukarkannya dengan barang lain karena barang yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan atau kualitas kurang baik, sehingga penerima memilih untuk menukarnya dengan barang yang lebih bermanfaat bagi mereka.

4. Pembagian Potensi

Ketidakselarasan antara distribusi wewenang dan tanggung jawab atas alokasi pekerjaan, ditandai dengan keterbatasan yang ambigu dan pelaksanaan yang terdesentralisasi.

a. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dilakukan pada apa yang sudah dibebankan atau dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada indikator tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang baik karena yaitu karena banyak masyarakat yang mengeluhkan kesulitan dalam memperoleh bantuan, seperti saldo yang kosong atau kesulitan dalam mendapatkan bantuan langsung karena petugas tidak bisa memberikan bantuan di lokasi. Pengawasan pimpinan

b. Wewenang

Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang untuk memilih atau tindakan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada wewenang dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara wewenang masih kurang baik. Hal ini dikarenakan wewenang pengelolaannya seperti keterlambatan pengiriman bahan pangan yang menyebabkan kualitas barang menurun, bahkan terkadang barang yang diterima sudah rusak atau tidak layak dikonsumsi. Selain itu penerima bantuan sering kali merasa kurang puas dengan kualitas bahan pangan yang diberikan.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Implementasi suatu program pasti akan dipengaruhi oleh berbagai keadaan, beberapa di antaranya mungkin membantu dan ada pula yang menghambat kemajuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang membantu dan yang menghambat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan atau tidaknya sebuah kebijakan pelaksanaan program BPNT, adapun faktor pendukung dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu:

a. Adanya Program Standard Operasional Procedure (SOP) Sesuai Dalam Melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada indikator SOP dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah baik yang mana dilihat dari SOP sudah baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023. Bantuan dari tingkat ke kecamatan disalurkan kedesa dan desa menyalurkan kepada penerima, program ini diatur tim pelaksana mulai dari strukturnya, kepala desa, pendamping, koordinator, dan *e-warong* sudah baik pelaksanaannya.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yaitu penghambat atau sebab terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan sebagai program. Di dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ada faktor penghambat yang bisa memengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan program ini.

a. Gangguan Jaringan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti pada indikator kemampuan teknis dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat disimpulkan bahwa kurang baik. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme program oleh petugas, seperti ATM sering gangguan dan minimnya pelatihan dalam pelaksana, selain itu lemahnya koordinasi antara dinas sosial, dan pihak penyalur, seperti bank atau *e-warong*. Akibatnya proses penyaluran bantuan menjadi lambat dan sulit terealisasi secara optimal.

b. Kurangnya Informasi Dari Pihak Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan mengenai komunikasi masih kurang baik. Hal ini dikarenakan penerima bantuan tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang cara menggunakan kartu elektronik maupun jadwal pencairan bantuan. Sebagian menerima mengetahui informasi yang lebih awal, tetapi banyak yang tidak mendapatkan informasi sama sekali. Selain itu, sejak awal pelaksanaan program, sosialisasi terkait teknis penggunaan kartu, tujuan, dan manfaat bantuan ini tidak dilakukan secara optimal. Akibatnya, sebagian besar penerima tidak memahami mekanisme program, sehingga bantuan tidak dimanfaatkan secara maksimal.

c. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Dalam Ketentuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada indikator dukungan masyarakat dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang baik. Hal ini karena kurangnya pemahaman terhadap prosedur program, adanya persyaratan administrasi yang dianggap memberatkan, serta minimnya peran aktif dari aparat desa dalam membantu masyarakat mengatasi kendala tersebut. Akibatnya sebagian

masyarakat merasa enggan atau kesulitan untuk mengakses bantuan, meskipun program ini bertujuan untuk meringankan beban mereka.

d. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti pada indikator kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang baik. Hal ini dikarenakan seperti menjual atau menukarkannya dengan barang lain karena barang yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan atau kualitas kurang baik, sehingga penerima memilih untuk menukarnya dengan barang yang lebih bermanfaat bagi mereka.

SIMPULAN

Temuan penelitian terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, setidaknya menghasilkan satu kesimpulan, yaitu: Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara disimpulkan kurang baik. Hal ini dilihat dari indikator yang kurang baik yaitu: Pertama, Kemampuan teknis kurang baik karena fasilitas penunjang kelancaran penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terdapat permasalahan. Kedua, kemampuan menjalani hubungan kurang baik karena masyarakat kurang tau dengan program ini. Ketiga, sosialisasi kurang baik karena sosialisasinya kurang berjalan baik kebanyakan penerima orang tua atau lansia tidak terlalu paham dengan bantuan ini. Keempat, komunikasi kurang baik karena kurang jelasnya informasi. Kelima, dukungan masyarakat kurang baik karena disini ada dua versi dari masyarakat yang menerima sangat terbantu seperti berterimakasih kepada kementerian sosial atas bantuan tersebut meringankan beban mereka, sedangkan yang belum dapat ingin mendapatkan juga kita memberikan syarat beberapa administrasi bagaimana kita juga perlu bantuan kepala desa dan aparat desa. Keenam, kepatuhan masyarakat kurang baik bisa dilihat dari penerima tidak benar-benar menggunakan bantuan untuk keluarga seperti menjual dan menukarkan barang lain. Ketujuh, tanggung jawab masih kurang baik dapat dilihat dari masyarakat mendapatkan masalah dan keluhan seperti saldonya kosong. Kedelapan, wewenang dapat dilihat dari keterlambatan datang bahan pangan bisa rusak atau kurang baik untuk dikonsumsi dan kadang-kadang tidak sesuai sama yang diharapkan penerima kurang puas dengan kualitas barang yang kurang baik. Dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat faktor pendukung yaitu adanya program SOP sudah menjalankan sesuai dalam melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Disisi lain terdapat faktor penghambat Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu gangguan jaringan, kurangnya informasi dari pihak program bantuan pangan non tunai (BPNT), kurangnya pemahaman masyarakat dalam ketentuan program bantuan pangan non tunai (BPNT), kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program bantuan pangan non tunai (BPNT).

DAFTAR PUSTAKA

Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG’, *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.

Arpandi, A. (2024) ‘EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.

Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) ‘EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BATU MERAH KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.

Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) ‘EFEKTIVITAS PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.

Budiman, A. and Souvia, B. (2023) ‘IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI’IYAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.

Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) ‘Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan’, *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.

Hasbiyah, S. (2022) ‘IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU’, *Administraus*, 6(2), pp. 160–168.

Hasbiyah, S. (2024) ‘IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.

Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) ‘PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NON FISIK DI DESA PALIAT KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.

Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) ‘Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan’, *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.

Munawarah, M. (2022) ‘PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN

HULU SUNGAI UTARA’, *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.

Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) ‘PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG’, *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.

Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.

Hayat (2018) *Kebijakan Publik*. Malang: Intrans Publishing.

Kementerian Sosial (2018) *Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai*. Jakarta.

Khasanah, K. (2020) *Implementasi Prongram Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatkan Ekonomi Keluarga Miskin Di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal*. UIN Walisongo.

Nasir, A. (2022) *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Sungai Anyar Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong*. Sekolah Tinggi Ilmu Adminstrasi (STIA) Amuntai.

Rahardja, P. and Manurung, M. (2020) *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Sidiq, U. and Choiri, Moh.M. (2019) *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Cv. Nata Karya.

Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Cv Alfabeta.

Wahab, A.S. (2017) *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.